



FKPKN TRIWULAN I

TAHUN 2024



Kanwil DJPb
PROVINSI JAMBI

Telp.
14090

Jl. M. Yoesoef Singadikane
No. 45, Telanaipura, Kota
Jambi, 36122



Kata Pengantar



Burhani AS

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dapat menyusun Laporan kegiatan Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN) secara tepat waktu.

Laporan kegiatan FKPKN ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2024 dalam rangka memenuhi tugas Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai *Treasury, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor*.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar - besarnya atas kontribusi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini terutama kepada Satuan Kerja mitra Kanwil DJPb, Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jambi dan unit eselon I Kementerian Keuangan Provinsi Jambi.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi sarana untuk menyediakan informasi kegiatan-kegiatan terkait fiskal dan keuangan pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, serta mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik.

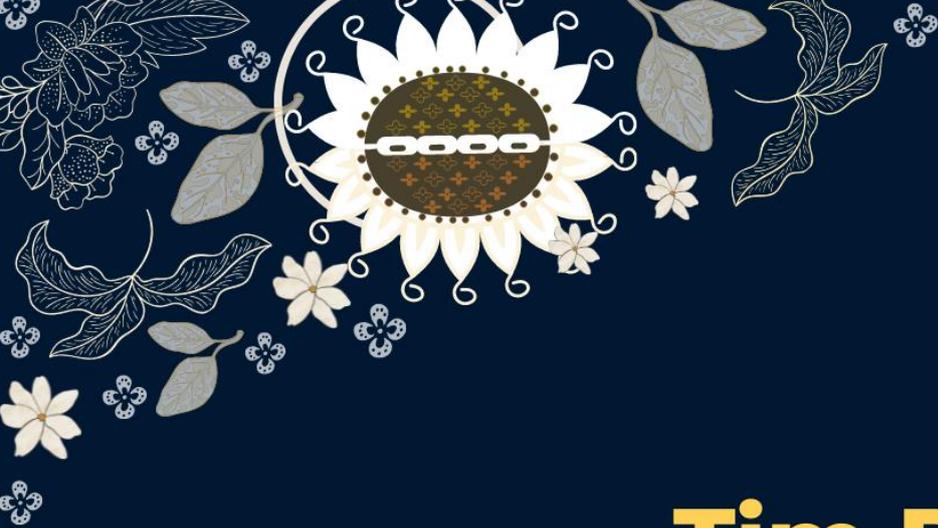
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, 16 April 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Burhani AS





Tim Penyusun

Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara
Kanwil DJPb Provinsi Jambi
Triwulan I Tahun 2024

Burhani AS

Pengarah

Asyep Syaefudin

Ketua

Istiqomah Handayani
Annisa Ainnur Farah
Agatha Early Ameliana
Yan Yosephin Saragi
Rita Purnama Sari
Nurul Ramadhini

Penyusun





Daftar Isi

i Kata Pengantar

ii Tim Penyusun

iii Daftar Isi

iv Executive Summary

1 Latar Belakang

2 Identifikasi Masalah

5 Pelaksanaan Kegiatan Periodik

23 Pelaksanaan Kegiatan Strategis/Tematik

30 Pelaksanaan Kegiatan Local Expert

34 Kesimpulan dan Rekomendasi

Executive Summary

Kanwil DJPb Provinsi Jambi melalui Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) tingkat daerah secara aktif berkolaborasi dan bersinergi baik dengan Kemenkeu Satu, berbagai tim/forum daerah, pimpinan pemerintah daerah, dan *local expert* melaksanakan berbagai kegiatan untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta arahan dan rekomendasi sebagai wujud peran Kanwil DJPb dalam membantu penyelesaian berbagai isu/permasalahan perekonomian dan fiskal di daerah. Berbagai kegiatan dilaksanakan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran serta memastikan pembangunan yang dilaksanakan dapat bermanfaat terhadap masyarakat.

Selama periode Triwulan I Tahun 2024, Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melaksanakan sebanyak 19 kegiatan periodik, 6 kegiatan strategis/tematik, serta 4 kegiatan yang melibatkan *local expert* dengan rincian sebagai berikut.

1. Kegiatan Periodik

Kegiatan rutin yang dilaksanakan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Jambi maupun unit vertikal yang telah dilaksanakan diantaranya Rapat Koordinasi, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Penyusunan LK Tingkat UAPPA-W Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi Tahun 2023 (*Unaudited*), Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran, Sosialisasi Peraturan dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, FGD Penyaluran Transfer Ke Daerah KPPN Muara Bungo, Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, Pelaksanaan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2024 Dan Sosialisasi Peraturan di KPPN Bangko, Rapat ALCO Regional Teknis, Deputies, dan Komite untuk Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023, 31 Januari 2024, dan 29 Februari 2024., Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2024 di KPPN Kuala Tungkal, Pembinaan Penyusunan LK UAKBUN-Daerah dan Koordinasi LKPD pada KPPN dan Pemda Lingkup KPPN Bangko dan KPPN Muara Bungo Tahun 2024, FGD Pemberdayaan UMKM KPPN Bangko, Rilis Bersama Kinerja Perekonomian Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2023, Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2023, FGD Percepatan Penyaluran Dana Desa TA 2024 KPPN Jambi, FGD Penyaluran Transfer ke Daerah Triwulan I Tahun 2024 Bersama Pemerintah Daerah



Kabupaten Kerinci & Kota Sungai Penuh, FGD Monitoring dan Pemberdayaan UMKM KPPN Bangko, FGD Penyaluran Transfer ke Daerah Semester I 2024 KPPN Bangko, dan *High Level Meeting* (HLM) dan Capacity Building TP2DD Provinsi Jambi Semester I Tahun 2024.

2. Kegiatan Strategis/Tematik

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai upaya untuk menunjang bahasan tematik Kajian Fiskal Regional dan ALCo Regional serta dalam rangka penguatan peran RCE Kanwil DJPb Provinsi Jambi diantaranya Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi, Rapat Kick-Off Meeting BIOCF-ISFL 2024, Talkshow TVRI “Ruang Publik : THR 2024 Cair”, Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemkab Kerinci, Sosialisasi Perencanaan, Penyaluran, Pencairan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Lingkup Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun 2024, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD Tahun 2025-2045 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

3. Kegiatan *Local Expert*

Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan yang melibatkan *local expert* Provinsi Jambi berupa Rapat Komite ALCo Regional Jambi Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023, 31 Januari 2024, dan 29 Februari 2024 dan Focus Group Discussion (FGD) Diseminasi Fiskal Regional tentang Capaian Indikator dan Strategi Peningkatan Daya Saing Infrastruktur Konektivitas di Provinsi Jambi dalam Kerangka Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN).



LATAR BELAKANG

Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara Triwulan I



LATAR BELAKANG

Di tahun 2024, ekonomi global masih dihadapkan dengan isu geopolitik, peningkatan suku bunga global, dan tren pelemahan tingkat permintaan global yang memengaruhi ekspor dan juga penurunan harga komoditas. Faktanya, tingkat pengangguran masih relatif tinggi dan tingkat pendapatan usaha masih menurun di sejumlah sektor. Bahkan sejumlah negara masih rentan dilanda krisis pangan dan energi. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 juga diproyeksi mengalami pelemahan.

Tahun ini penuh tantangan dalam mengelola keuangan negara karena isu geopolitik serta pelemahan global dan tren harga komoditas yang melemah. Untuk menghadapi hal tersebut, pengelolaan keuangan negara harus tetap terjaga, sehingga dapat meminimalisasi risiko yang dihadapi dan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, terkait penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD), seluruh elemennya pada tahun ini disalurkan melalui KPPN di daerah. Ini merupakan tantangan tersendiri mengingat masih banyak diperlukan perbaikan atas penyaluran seluruh elemen TKD melalui KPPN di daerah.

Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) walaupun belum lama keberadaannya, namun manfaatnya sudah dapat dirasakan dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Adapun dana APBN yang dikelola di wilayah Jambi mencapai Rp23,59 Triliun, yang terdiri dari pagu belanja Kementerian/Lembaga Rp8,92 Triliun dan TKD sebesar Rp14,67 Triliun. Berbagai kegiatan terkait pengelolaan keuangan negara sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholder*. Dengan adanya FKPKN, kesadaran untuk bersinergi semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan antusiasme terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPKN.

Permasalahan yang berulang setiap tahun anggaran masih saja terjadi. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang belum berkualitas. Dengan sinergi dan berkolaborasi, diharapkan semua *stakeholder* yang terkait dengan penyelenggaraan keuangan negara mampu menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk menghadapi isu-isu pembangunan regional. Tidak terbatas pada pengelolaan Keuangan Daerah saja, namun juga dapat memberikan dukungan nyata di level ekonomi regional kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menumpuknya pencairan dana di akhir tahun masih saja terjadi di tahun 2023 walaupun intensitasnya semakin menurun. Namun demikian, hal ini menjadi perhatian pimpinan sehingga kegiatan-kegiatan yang mendukung perbaikan pelaksanaan anggaran terus menerus diadakan sejak awal tahun 2024 dalam rangka edukasi dengan harapan adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan anggaran.

Dari berbagai dinamika dalam pengelolaan fiskal di daerah dan pengelolaan keuangan negara di daerah pada khususnya diperlukan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya sinergi antar unit terkait, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dengan kualitas yang lebih baik.



IDENTIFIKASI MASALAH

Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara Triwulan I

IDENTIFIKASI MASALAH

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi *Treasury, Regional Chief Economist (RCE)*, dan *Financial Advisor* dalam Triwulan I tahun 2024 menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Peningkatan sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan APBN, APBD serta dana TKD. Akselerasi penyaluran TKD merupakan tantangan tersendiri mengingat mulai tahun 2023, semua elemen TKD disalurkan melalui KPPN di daerah.
2. Peningkatan kerjasama untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Provinsi Jambi dengan pemangku kepentingan di Provinsi Jambi khususnya yang terkait pembiayaan.
3. Penguatan kelembagaan internal maupun eksternal Kemenkeu Satu dan peningkatan kompetensi pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jambi khususnya terkait penyusunan Kajian Fiskal Regional dan ALCo Regional.
4. Strategis Perbaikan Nilai IKPA dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan memperhatikan indikator dalam IKPA terutama indikator penyerapan anggaran dan capaian output
5. Penguatan dan Kerjasama dengan pihak Eksternal seperti akademisi, profesional lokal di bidang ekonomi dan keuangan negara (*local expert*) di wilayah Provinsi Jambi.
6. Koordinasi dengan pihak eksternal diperlukan lebih mendalam terkait isu-isu strategis seperti pemulihan ekonomi dan pembangunan jalan tol.

Adapun terkait isu/permasalahan yang ada di Kanwil DJPb Jambi dan tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

No	Isu/Permasalahan	Peran/Kontribusi/Tindak Lanjut/ Kanwil DJPb/ Kanwil Kemenkeu
1.	Perlunya untuk meningkatkan sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan APBN, APBD serta dana TKD.	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN, APBD serta dana TKD seperti Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Penyusunan LK Tingkat UAPPA-W Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi Tahun 2023 (Unaudited), FGD Penyaluran Transfer Ke Daerah KPPN Muara Bungo, Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, Pembinaan Penyusunan LK UAKBUN-Daerah dan



		Koordinasi LKPD pada KPPN dan Pemda Lingkup KPPN Bangko dan KPPN Muara Bungo Tahun 2024, FGD Percepatan Penyaluran Dana Desa TA 2024 KPPN Jambi, FGD Penyaluran Transfer ke Daerah Triwulan I Tahun 2024 Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci & Kota Sungai Penuh, dan FGD Penyaluran Transfer ke Daerah Semester I 2024 KPPN Bangko.
2.	Peningkatan kerjasama untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Provinsi Jambi dengan pemangku kepentingan di Provinsi Jambi khususnya terkait pembiayaan.	Kanwil mengadakan kegiatan yang berupa pemetaan kelompok UMKM, FGD Pemberdayaan UMKM dan FGD Monitoring dan Pemberdayaan UMKM KPPN Bangko.
3.	Penguatan kelembagaan internal maupun eksternal Kemenkeu Satu dan peningkatan kompetensi pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jambi khususnya terkait penyusunan Kajian Fiskal Regional dan ALCO Regional.	Kanwil mengadakan kegiatan yang berupa Rapat ALCO Regional Tingkat Teknis, Deputies dan Komite setiap bulannya.
4.	Strategis Perbaikan Nilai IKPA dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan memperhatikan indicator dalam IKPA terutama indikator penyerapan anggaran dan capaian output	Kanwil mengadakan kegiatan yang berupa Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran, Sosialisasi Peraturan dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Pelaksanaan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2024 dan Sosialisasi Peraturan Di KPPN Bangko, dan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2024 di KPPN Kuala Tungkal.
5.	Penguatan dan kerjasama dengan pihak eksternal seperti akademisi, profesional lokal di bidang ekonomi dan keuangan negara (<i>local expert</i>) di wilayah Provinsi Jambi.	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM seperti mengundang local expert pada FGD Diseminasi Fiskal Regional tentang Capaian Indikator dan Strategi Peningkatan Daya Saing



		Infrastruktur Konektivitas di Provinsi Jambi dan Rapat ALCo Komite setiap bulannya.
6.	Koordinasi dengan pihak eksternal diperlukan lebih mendalam terkait isu-isu strategis seperti pemulihan ekonomi dan pembangunan jalan tol.	Kepala Kanwil beserta jajarannya berpartisipasi dan berkontribusi aktif pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi, Rapat Kick-Off Meeting BIOCF-ISFL 2024, dan Rilis Bersama Kinerja Perekonomian Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2023, High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TP2DD Provinsi Jambi Semester I Tahun 2024.
7.	Perlu berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah/ Pimpinan Lembaga terkait supaya peran Kanwil sebagai <i>Treasury. Financial Advisor</i> , dan <i>Regional Chief Economist</i> dapat memberi dampak bagi masyarakat seperti pemulihan ekonomi dimana APBN yang memiliki peran dalam memantik pertumbuhan ekonomi.	Kepala Kanwil berkoordinasi aktif dengan Gubernur Jambi, Walikota Jambi, Kepala BI Jambi, dan Bupati dalam wilayah Provinsi Jambi sebagai Perwakilan Kemenkeu di Jambi.



PELAKSANAAN KEGIATAN PERIODIK

Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara Triwulan I

PELAKSANAAN KEGIATAN PERIODIK

1. SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LK TINGKAT UAPPA-W LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 (UNAUDITED)

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Januari 2024 pukul 08.30 WIB s.d. selesai secara hybrid di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi dan Teams Meeting

b. Unit/Pihak Terlibat

Sosialisasi dan Bimtek ini melibatkan Bidang PAPK dengan perwakilan UAPPA-W di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mengawal proses penyusunan LK Tahunan (Unaudited) dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W). Pada kegiatan ini disampaikan materi Pedoman Penyusunan LK UAPPA-W Tahun 2023 (Unaudited), Review LK UAPPA-W Periode Triwulan III Tahun 2023, penyelesaian To-Do List, Rekonsiliasi dan Tutup Periode 12, dan dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab.



d. Hasil yang Dicapai

Satker dapat lebih memahami ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan dan memperhatikan jadwal penyampaian laporan keuangan (*unaudited*) dan rekonsiliasi sehingga penyampaian laporan keuangan (*unaudited*) dilaksanakan tepat waktu, serta satker dapat segera menindaklanjuti penyelesaian transaksi di tahun 2023 dalam berbagai modul pada aplikasi SAKTI yang berdampak pada laporan keuangan.

2. RAPAT KOORDINASI DAERAH PELAKSANAAN ANGGARAN, SOSIALISASI PERATURAN DAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024

a. Waktu dan Tempat

Rapat Koordinasi Daerah ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 pukul 09.00 WIB s.d. selesai bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan daring melalui Ms Teams

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini melibatkan Bidang PPA I dengan peserta dari satuan kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi

c. Rincian Kegiatan

Rapat Koordinasi Daerah ini dibuka oleh MC, dilanjutkan dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi disebutkan bahwa diperlukan RAKORDA PA, sebagai langkah dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan pada tahun 2023, sehingga dapat menjadi perhatian agar anggaran Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Paparan yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah Evaluasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2023, Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, dan Current Issues Layanan Kanwil DJPb Provinsi Jambi.



d. Hasil yang Dicapai

Satker mengetahui dan memahami segala materi yang diberikan antara lain perkembangan pelaksanaan anggaran TA 2023, pokok-pokok penting terkait langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun 2024 demi tercapainya target output dan outcome yang dapat dirasakan di tahun 2024, dan tetap menjaga kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA.

3. FGD PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH KPPN MUARA BUNGO

a. Waktu dan Tempat

FGD dilaksanakan pada Hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 pukul 09.00 s.d 11.30 WIB bertempat di Aula KPPN Muara Bungo.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini melibatkan KPPN Muara Bungo dengan perwakilan BPKAD/Bakeuda, DPMD, dan Inspektorat Daerah dari Pemerintah Kabupaten Bungo dan Tebo.

c. Rincian Kegiatan

FGD dibuka oleh Kepala KPPN Muara Bungo dengan penyampaian sambutan dan paparan terkait Realisasi APBN TKD Semester II TA 2023. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2024 yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bank dan sesi diskusi terkait Syarat Salur Tahap I Dana Desa Earmark, Syarat Salur Tahap I Dana Desa Non Earmark, Progress Realisasi Rencana kegiatan DAK Fisik menjadi Kontrak. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pemberian penghargaan terhadap Pemda Pengelola Dana Desa dan DAK Fisik Terbaik Lingkup KPPN Muara Bungo



d. Hasil yang Dicapai

Pemerintah Daerah memahami materi yang disampaikan terkait penyaluran Transfer ke Daerah dan langkah-langkah percepatan penyaluran TKD, selain itu didapatkan penyelesaian atas kendala yang dihadapi dalam penyaluran TKD.

4. PEMBINAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Pembinaan sistem akuntansi pemerintah daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi dilaksanakan pada Selasa, 16 Januari 2024 pukul 09.30 WIB s.d. 12.00 WIB bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini melibatkan Bidang PAPK dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKPD Provinsi Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Pada kegiatan ini dilakukan *sharing session* dengan Pemerintah Daerah terkait data stunting, penanganan stunting, pelaksanaan TDF, dan pertukaran data antara Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Data stunting mulai dipantau sejak tahun 2021 dan pemerintah daerah melaporkannya secara mandiri tanpa konsolidasi. BPKPD Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk mengumpulkan data stunting. Penggunaan SIPD yang masih baru menyebabkan kurangnya pemahaman terkait tagging untuk stunting. Pelaksanaan TDF berjalan lancar, namun ada kendala pada syarat pencairan TDF yaitu perkiraan belanja bulan Januari. Pencatatan TDF telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan data, disarankan untuk membuat daftar permintaan data yang dibutuhkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jambi. Selain itu, Pemerintah daerah membutuhkan aplikasi khusus untuk mencatat persediaan, karena modul persediaan belum tersedia pada SIPD. Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan berkoordinasi dengan Direktorat SITP terkait aplikasi persediaan yang relevan dengan akuntansi dan pelaporan pemerintah daerah.



d. Hasil yang Dicapai

Kebutuhan data terkait *stunting* untuk analisis dalam GFS dapat terpenuhi. Selain itu, diharapkan pembinaan ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

5. PELAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2024 DAN SOSIALISASI PERATURAN DI KPPN BANGKO

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Januari 2024 bertempat di Aula KPPN Bangko.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini melibatkan Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Jambi, KPPN Bangko, dan pengelola keuangan dari Satuan Kerja lingkup wilayah kerja KPPN Bangko.



c. Rincian Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh MC, dilanjutkan dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Plh. Kepala KPPN Bangko menyampaikan *opening remarks* terkait pencapaian IKPA KPPN Bangko selaku Kuasa BUN dan indikator indikator yang perlu ditingkatkan oleh satker. Materi yang disampaikan pada sosialisasi ini antara lain Press Release APBN KITA oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Bangko, Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2024 oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C Kanwil DJPb Provinsi Jambi, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Digitalisasi Pembayaran oleh CSO KPPN Bangko. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi.



d. Hasil yang Dicapai

Satker mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2023. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, satker dapat menyusun dan menerapkan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2024. Adanya kegiatan ini diharapkan output yang telah direncanakan, terutama output Prioritas Nasional (PN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat tercapai sebelum tahun anggaran berakhir dan Satker berkomitmen melakukan langkah-langkah peningkatan nilai IKPA. Selain itu, Kanwil DJPb bersinergi dengan KPPN untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan.

6. **RAPAT ALCO REGIONAL TEKNIS UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

a. Waktu dan Tempat

Rapat Teknis dilaksanakan pada Jumat, tanggal 12 Januari 2024 pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB di Ruang Rapat Kanwil DJPb.

b. Unit/Pihak Terlibat

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan pejabat pengawas pada masing-masing unit Eselon I Kementerian Keuangan di Jambi dan perwakilan pelaksana.

c. Rincian Kegiatan



Rapat dibuka oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Desember 2023. Rapat dilanjutkan dengan pemaparan oleh

masing-masing perwakilan dari unit Eselon I yaitu Realisasi Penerimaan Perpajakan dan issue strategis, Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai dan issue Strategis, Realisasi Penerimaan Lingkup DJKN dan Special Mission dan issue strategis, Realisasi Belanja APBN dan issue strategis, serta Perkembangan Ekonomi Regional, Realisasi TKD dan Issue Strategis.

d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan hasil rapat tersebut diketahui bahwa seluruh penerimaan tercapai di atas target dan pendapatan daerah pada I-Account APBD tercapai 85,36%. Dari sisi belanja, belanja pemerintah pusat pada I-Account APBN tercapai Rp24,1 triliun (97,37%), sedangkan belanja pemerintah daerah pada I-Account APBD tercapai Rp17,75 triliun (84,44%). Rasio Produktivitas Tenaga Kerja Jambi lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, meskipun selama 5 tahun terakhir terus berfluktuatif dan mengalami penurunan yang tajam pada 2020. Selain itu, didapatkan beberapa tantangan Provinsi Jambi beserta strategi pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi pengangguran.

7. **RAPAT ALCO REGIONAL DEPUTIES UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

a. Waktu dan Tempat

Rapat Deputies dilaksanakan pada Selasa, tanggal 16 Januari 2024 pukul 14.00 s.d. 15.30 WIB secara hybrid di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi bagi Pejabat Administrator pada Unit Kemenkeu yang berlokasi di Kota Jambi dan di media virtual Teams bagi Pejabat Administrator pada unit Kemenkeu di luar Kota Jambi. Provinsi Jambi

b. Unit/Pihak Terlibat

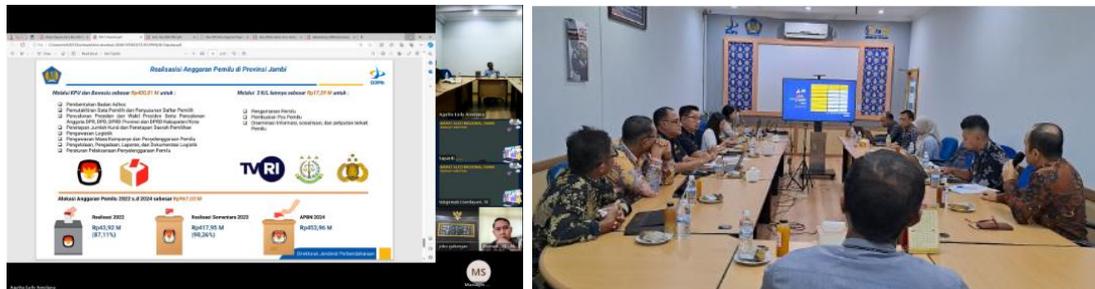
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan pejabat administrator pada masing-masing unit Eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Jambi dan perwakilan pejabat fungsional dan pelaksana.

c. Rincian Kegiatan

Rapat dibuka dan dimoderatori oleh Kepala Bagian Umum. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Desember 2023. Rapat



dilanjutkan dengan pemaparan oleh masing-masing perwakilan dari unit Eselon I yaitu Realisasi Penerimaan Perpajakan dan issue strategis, Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai dan issue Strategis, Realisasi Penerimaan Lingkup DJKN dan Special Mission dan issue strategis, Realisasi Belanja APBN dan issue strategis, serta Perkembangan Ekonomi Regional, Realisasi TKD dan Issue Strategis.



d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan rapat ini, didapatkan beberapa policy response untuk mengatasi isu yang terdapat dalam Provinsi Jambi antara lain isu penerimaan negara, optimalisasi pemberdayaan UMKM, Isu Potensi pagu minus, Isu tidak tercatatnya banyak komoditi Ekspor, isu proyek strategis nasional, dan isu tematik ALCo: Analisis Peluang Dan Tantangan Serta Strategi Kebijakan Pusat-daerah dalam Mengatasi Pengangguran dan Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja di Daerah.

8. PELAKSANAAN SOSIALISASI PERATURAN DAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2024 DI KPPN KUALA TUNGKAL

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Selasa, 27 Februari 2024 bertempat di Aula KPPN Kuala Tungkal

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini melibatkan Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Jambi, KPPN Kuala Tungkal, dan Pengelola keuangan dari Satuan Kerja lingkup wilayah kerja KPPN Kuala Tungkal.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh MC, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa. Materi yang disampaikan pada sosialisasi ini antara lain Evaluasi Implementasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2023, Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran (LLSPA) yang perlu dilaksanakan oleh Satker sesuai arahan Menteri Keuangan, Penjelasan mengenai Current Issue Layanan Kanwil DJPb Provinsi Jambi, dan Digitalisasi Pembayaran dan Keamanan Transaksi Digital menggunakan KKP. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi.



d. Hasil yang Dicapai

Satker mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2023 dan memahami langkah-langkah pengamanan transaksi digital menggunakan KKP, serta berkomitmen melakukan langkah-langkah peningkatan nilai IKPA. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, satker dapat menyusun dan menerapkan Langkah- Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Selain itu, diharapkan output yang telah direncanakan, terutama output Prioritas Nasional (PN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat tercapai sebelum tahun anggaran berakhir. Kanwil DJPb bersinergi dengan KPPN untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan. Satker lebih *aware* terhadap *current issue* layanan revisi, hibah, dan MP PNBPN di Kanwil DJPb.

9. **PEMBINAAN PENYUSUNAN LK UAKBUN-DAERAH DAN KOORDINASI LKPD PADA KPPN DAN PEMDA LINGKUP KPPN BANGKO DAN KPPN MUARA BUNGO TAHUN 2024**

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan koordinasi LKPD pada Kabupaten Sarolangun dilaksanakan pada hari Senin, 26 Februari 2024 bertempat di Ruang Kepala Sekretaris BPKAD Kabupaten Sarolangun. Kegiatan koordinasi LKPD pada Kabupaten Merangin dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Februari 2024 bertempat di Ruang Rapat BPKAD Kabupaten Merangin. Kegiatan pembinaan penyusunan LK UAKBUN-Daerah pada KPPN Bangko dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Februari 2024 bertempat di Aula KPPN Bangko. Kegiatan koordinasi LKPD pada Kabupaten Tebo dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Februari 2024 bertempat di Aula Kajanglako BPKAD Kabupaten Tebo. Kegiatan koordinasi LKPD pada Kabupaten Bungo dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Februari 2024 bertempat di Ruang Rapat BPKAD Kabupaten Bungo. Kegiatan pembinaan penyusunan LK UAKBUN-Daerah pada KPPN Muara Bungo dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Februari 2024 bertempat di Ruang TLC KPPN Muara Bungo.

b. Unit/Pihak Terlibat

Dalam rangkaian kegiatan ini melibatkan Bidang PAK Kanwil DJPb Jambi, BPKAD Kabupaten Sarolangun, BPKAD Kabupaten Merangin, BPKAD Kabupaten Tebo, BPKAD Kabupaten Bungo, KPPN Bangko, dan KPPN Muara Bungo.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan berupa *sharing session* antara Bidang PAK dengan Pemerintah Daerah atau KPPN. Berdasarkan *sharing session* dengan pemerintah daerah didapatkan beberapa hal antara lain Pemda masih belum memahami sepenuhnya PSAP 17 tentang Properti Investasi, diusahakan pada tahun 2024 akan segera melakukan inventarisasi aset-aset yang termasuk dalam kriteria properti investasi dan menyajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan aplikasi SIPD RI masih banyak kendala yang dialami oleh Pemda seperti aplikasi yang masih error, data laporan yang tidak dapat ditarik, fitur-fitur belum sepenuhnya lengkap, akses aplikasi saat jam kerja masih sering terganggu, dan PIC aplikasi yang sulit dihubungi ketika terjadi masalah. Pemda berharap Kanwil DJPb Provinsi Jambi dapat memfasilitasi adanya *Sharing Session* atau Sosialisasi terkait dengan PSAP 17 tentang Properti Investasi dan Penggunaan aplikasi SIPD RI pada Pemda.

Selain itu, atas pembinaan penyusunan LK UAKBUN-Daerah yang dilaksanakan pada KPPN Bangko dan KPPN Muara Bungo, secara umum telah mencapai nilai yang optimal dari seluruh kriteria yaitu akurasi data, ketepatan waktu, kelengkapan dokumen dan tingkat partisipasi. Hal yang perlu dimitigasi dalam penyusunan LK UAKBUN-Daerah periode Audited yaitu pada kriteria akurasi data yaitu analisis LK BUN dan penyusunan CaLK. Sebagaimana disampaikan dalam kegiatan pembinaan, diperlukan internalisasi secara berkelanjutan dalam mengawal dan menambah pemahaman atas berbagai transaksi yang mempengaruhi kualitas data laporan keuangan, baik Kuasa BUN maupun K/L yang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawab KPPN selaku Kuasa BUN Daerah.





d. Hasil yang Dicapai

Kanwil DJPb mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan memberikan solusi atas kendala tersebut. Selain itu, KPPN dapat mengetahui Hal yang perlu dimitigasi dalam penyusunan LK UAKBUN-Daerah periode Audited sehingga dapat mempertahankan nilai optimal dari seluruh kriteria yaitu akurasi data, ketepatan waktu, kelengkapan dokumen dan tingkat partisipasi.

10. RAPAT ALCO REGIONAL TEKNIS UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 2024

a. Waktu dan Tempat

Rapat Teknis dilaksanakan pada Selasa, tanggal 13 Februari 2024 pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi

b. Unit/Pihak Terlibat

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan pejabat pengawas pada masing-masing unit Eselon I Kementerian Keuangan di Jambi dan perwakilan pelaksana.

c. Rincian Kegiatan



Rapat dibuka oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Januari 2024. Rapat dilanjutkan dengan pemaparan oleh masing-masing

perwakilan dari unit Eselon I yaitu Realisasi Penerimaan Perpajakan dan issue strategis, Realisasi Penerimaan Kepabeaan dan Cukai dan issue Strategis, Realisasi Penerimaan Lingkup DJKN dan Special Mission dan issue strategis, Realisasi Belanja APBN dan issue strategis, serta Perkembangan Ekonomi Regional, Realisasi TKD dan Issue Strategis.

d. Hasil yang Dicapai

Melalui rapat ini didapatkan isu-isu strategis antara lain pentingnya pendirian PLB di Kabupaten Kerinci, potensi pengembangan penggalan biji emas Jambi, perhitungan

rasio kemandirian pemerintah daerah, dan pemberian reward dan punishment untuk daerah melalui Insentif Fiskal.

11. RAPAT ALCO REGIONAL DEPUTIES UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 2024

a. Waktu dan Tempat

Rapat Deputies dilaksanakan pada Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB secara hybrid di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi bagi Pejabat Administrator pada Unit Kemenkeu yang berlokasi di Kota Jambi dan di media virtual Teams bagi Pejabat Administrator pada unit Kemenkeu di luar Kota Jambi

b. Unit/Pihak Terlibat

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan pejabat administrator pada masing-masing unit Eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Jambi dan perwakilan pejabat fungsional dan pelaksana.

c. Rincian Kegiatan



Rapat dibuka dan dimoderatori oleh Kepala Bidang PAPPK. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Januari 2024. Rapat dilanjutkan dengan pemaparan oleh masing-masing perwakilan dari unit Eselon I

yaitu Realisasi Penerimaan Perpajakan dan issue strategis, Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai dan issue Strategis, Realisasi Penerimaan Lingkup DJKN dan Special Mission dan issue strategis, Realisasi Belanja APBN dan isu strategis, serta Perkembangan Ekonomi Regional, Realisasi TKD dan Isu Strategis.

d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan rapat ini, didapatkan beberapa *policy response* untuk mengatasi isu yang terdapat dalam Provinsi Jambi antara lain isu penerimaan negara, optimalisasi pemberdayaan UMKM, isu rekening RPATA yang belum selesai dibayarkan dan memberikan penegasan kepada satker update halaman III DIPA, isu tidak tercatatnya banyak komoditi ekspor, isu Proyek Strategis Nasional, dan isu tematik ALCo: Analisis Perkembangan Belanja Program Infrastruktur Konektivitas.

12. FGD PEMBERDAYAAN UMKM KPPN BANGKO

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan FGD ini dilaksanakan pada Kamis, 22 Februari 2024 bertempat di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sarolangun.



b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini melibatkan KPPN Bangko dan Dinas KUKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kab. Sarolangun.

c. Rincian Kegiatan

FGD Pemberdayaan UMKM diselenggarakan untuk sharing informasi terkait pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan untuk mendorong optimalisasi transaksi non tunai pada UMKM. Pada sharing informasi didapatkan informasi potensi UMKM, sektor usaha dominan, dan UMKM unggulan di wilayah Kabupaten Sarolangun.



d. Hasil yang Dicapai

Melalui kegiatan ini diperoleh komitmen bersama antara KPPN Bangko dengan Dinas KUKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sarolangun untuk menjalin kerja sama dan koordinasi yang lebih baik ke depannya dalam upaya pemberdayaan UMKM, khususnya di wilayah Kabupaten Sarolangun. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah kesediaan Dinas KUKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sarolangun untuk turut mengundang KPPN Bangko dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan para pelaku UMKM di Kabupaten Sarolangun

13. RILIS BERSAMA KINERJA PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI TRIWULAN IV TAHUN 2023

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 5 Februari 2024 pukul 14.00 s.d. selesai bertempat di Aula BAPPEDA Provinsi Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini melibatkan BPS Provinsi Jambi, BI Perwakilan Provinsi Jambi, Kanwil DJPb Provinsi Jambi, & BAPPEDA Provinsi Jambi serta media massa.

c. Rincian Kegiatan

Pada kegiatan ini disampaikan rilis data dan informasi Triwulan IV 2023, Pertumbuhan Ekonomi Prov Jambi (BPS), Outlook Perekonomian Prov Jambi (BI), APBN Kita Provinsi Jambi (DJPb), dan Kinerja APBD Provinsi Jambi (BAPPEDA).



d. Hasil yang Dicapai

Rilis Kondisi Fiskal Triwulan IV Tahun 2023 dan Gambaran Pagu Belanja APBN untuk Provinsi Jambi kepada media lokal di Jambi.

14. PELUNCURAN LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2023

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 31 Januari 2024 pukul 09.00 s.d. 12.00 bertempat di Ruang Kajang Lako, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia dengan mengundang Gubernur Jambi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Prov Jambi, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Kakanwil DJPb Jambi, Kepala BPS Prov Jambi, Rektor Universitas Negeri Jambi, dan Ketua ISEI Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Acara dibuka dengan *Keynote Speech* oleh Gubernur Bank Indonesia. Kemudian, dilanjutkan dengan Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2023 dan penyampaian seminar nasional. Pada seminar nasional disampaikan Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional 2023 oleh Deputy Gub BI, Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Struktur Perekonomian Nasional oleh Deputy Bid Ekonomi Kementerian PPN/BAPPENAS, Peran Perbankan dalam Mendorong Pembiayaan Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan oleh Presiden Direktur Bank BCA, dan Transformasi Sektor Riil Melalui Hilirisasi untuk Menjaga Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan oleh Rektor Perbanas *Institute*.



d. Hasil yang Dicapai

Penyamaan persepsi terkait arah strategi moneter tahun 2024.

15. FGD PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA TA 2024 KPPN JAMBI

a. Waktu dan Tempat

FGD dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 bertempat di Aula Lantai 2 KPPN Jambi

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini melibatkan KPPN Jambi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan FGD Percepatan Penyaluran Dana Desa TA 2024 dibuka oleh Kepala Seksi Bank, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dan sesi diskusi. Materi yang disampaikan antara lain evaluasi penyaluran Dana Desa TA 2023, langkah strategis untuk pemda dalam rangka percepatan penyaluran dana desa, dan petunjuk Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2024.



d. Hasil yang Dicapai

Pemerintah Daerah mengetahui dan memahami petunjuk penyaluran Dana Desa Tahap I TA 2024 sehingga Dana Desa di KPPN Jambi dapat tersalur dengan cepat.

16. FGD PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2024 BERSAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI & KOTA SUNGAI PENUH

a. Waktu dan Tempat

FGD dilaksanakan pada Rabu, 31 Januari 2024 bertempat di Aula KPPN Sungai Penuh.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini melibatkan KPPN Sungai Penuh bersama BPKPD, DPMD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan ini dibuka dengan penyampaian tujuan kegiatan oleh Plt. Kepala KPPN Sungai Penuh, dilanjutkan dengan pemaparan materi dan sesi diskusi. Materi yang disampaikan antara lain Mekanisme Penyaluran Dana Desa TA 2024 oleh Kepala



Seksi Bank dan Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah selama tahun 2023 oleh Plt. Kepala KPPN. Pada kegiatan ini juga diberikan apresiasi berupa penyerahan piagam penghargaan kepada pemerintah daerah atas Kinerja dan Koordinasi yang baik dalam penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik di tahun 2023.



d. Hasil yang Dicapai

Pemerintah Daerah memahami mekanisme penyaluran Dana Desa TA 2024 dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

17. FGD MONITORING DAN PEMBERDAYAAN UMKM KPPN BANGKO

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 23 Januari 2024 bertempat di Aula KPPN Bangko.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini melibatkan KPPN Bangko bersama PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Bangko dan Sarolangun, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Merangin dan Sarolangun.

c. Rincian Kegiatan

FGD ini diselenggarakan sebagai bentuk dukungan terhadap sinergi pemberdayaan UMKM melalui koordinasi dengan penyalur pembiayaan ultra mikro beserta Dinas Koperasi dan UMKM setempat untuk kegiatan Pemberdayaan UMKM tahun 2024. Pembahasan dalam FGD ini antara lain Koordinasi pelaksanaan kegiatan Sinergi Pemberdayaan UMKM yang akan dilaksanakan KPPN Bangko sebagai Kantor Vertikal DJPb untuk tahun 2024, Evaluasi realisasi penyaluran UMi untuk tahun 2021-2023; dan Koordinasi pelaksanaan Monev Ketepatan Data Debitur untuk triwulan I tahun 2024.





d. Hasil yang Dicapai

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam pemberdayaan UMKM dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan penyalur pembiayaan ultra mikro.

18. FGD Penyaluran Transfer ke Daerah Semester I 2024 KPPN Bangko

a. Waktu dan Tempat

FGD dilaksanakan pada Senin, 22 Januari 2024 bertempat di Aula KPPN Bangko.

b. Unit/Pihak Terlibat

FGD ini melibatkan KPPN Bangko bersama BPKAD, DPMD, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dan Sarolangun.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Kepala KPPN Bangko, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan sesi diskusi. Materi yang disampaikan terkait Mekanisme Penyaluran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Seksi Bank. Kegiatan ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan kepada masing-masing Pemda serta foto bersama.



d. Hasil yang Dicapai

Pemerintah Daerah mengetahui Mekanisme Penyaluran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 dan dapat melakukan perbaikan berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran transfer ke daerah yang diberikan.

19. HIGH LEVEL MEETING (HLM) DAN CAPACITY BUILDING TP2DD PROVINSI JAMBI SEMESTER I TAHUN 2024

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2024 bertempat di Swiss Ballroom, Swiss-Belhotel.



b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Gubernur Jambi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) dan para jajaran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

c. Rincian Kegiatan

Acara HLM TP2DD dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H. Pada pembukaannya, Gubernur Jambi mengungkapkan optimism bahwa melalui HLM dan Capacity Building ini akan mendorong inovasi percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transformasi tata kelola keuangan Daerah.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Warsono dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) semester II 2023 yang dikeluarkan Satgas P2DD menunjukkan seluruh TP2DD se Provinsi Jambi telah dapat mempertahankan predikat sebagai Pemda 'Digital'.

Predikat ini harus dipertahankan dengan terus mendorong penambahan kanal pembayaran digital baru untuk pembayaran pajak atau retribusi, seperti penyediaan EDC, uang elektronik atau e-commerce yang kini sedang proses pengembangan untuk pembayaran PBB serta meningkatkan realisasi pemanfaatan kanal digital (QRIS, Mobile Banking, e-Commerce) pada penerimaan dan belanja daerah.

Acara ini juga dihadiri oleh Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko, Ferry Irawan, S.E., M.S.E.

Pada paparannya disampaikan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang baik (5,20%) dan inflasi yang terjaga (2,50) diharapkan PDB per Kapita Provinsi Jambi dapat semakin meningkat kedepannya. Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah ini pada intinya diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah dengan tetap menjaga akses masyarakat terhadap layanan dasar wajib dan kemudahan berusaha.

Adapun tiga komponen strategi untuk mencapai tujuan, yakni:

- Revitalisasi mesin konvensional
- Pembangunan mesin ekonomi baru, salah satunya melalui digitalisasi
- Penguatan ketahanan sosial dan pemberdayaan



d. Hasil yang Dicapai

Memberikan informasi kepada para OPD masing-masing Pemda Kab/Kota se-Provinsi Jambi untuk meningkatkan capaian Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan strategi peningkatan kinerja guna meraih *Championships* TP2DD. Sebagai informasi untuk pemerintah daerah lingkup Provinsi Jambi, capaian kinerja TP2DD belum optimal. Hal itu terlihat dari sisi peringkat lingkup regional Sumatra, dimana Kota Jambi meraih peringkat 5 untuk katagori Kota, Provinsi Jambi menduduki peringkat 8, sedangkan Kabupaten Tebo meraih peringkat 13 untuk katagori Kabupaten.



PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS/TEMATIK

Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara Triwulan I

KEGIATAN STRATEGIS/TEMATIK

Kegiatan tematik merupakan kegiatan dengan tema atau isu tertentu baik yang berasal dari kebijakan/ arahan pimpinan pusat dan/atau inisiatif Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai hasil sinergi dan kolaborasi dengan pihak lainnya di daerah sesuai dengan karakteristik/kebutuhan di daerah. Bentuk kegiatan tematik berupa kegiatan pelaksanaan tugas Regional Chief Economist, Financial Advisor dan kolaborasi Kemenkeu Satu di daerah. Untuk periode Triwulan I 2024, kegiatan tematik yang diangkat adalah “Penguatan Peran Kanwil DJPb sebagai RCE”. Kegiatan strategis/tematik pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

1. RAPAT KOORDINASI TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 bertempat di Ruang Aula Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Bappeda Provinsi Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala Bidang PPA I, dan para jajaran Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi

c. Rincian Kegiatan

Acara dimulai dengan pemberian gambaran umum kondisi pemberantasan stunting di Provinsi Jambi oleh Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi. Kemudian, dilanjutkan dengan pemberian apresiasi kepada kecamatan dan desa dengan TPPS terbaik. Selanjutnya masuk ke inti acara, yakni pemberian arahan oleh Wakil Gubernur Provinsi Jambi.

Target nasional penurunan prevalensi stunting adalah 14%, sedangkan penurunan stunting Provinsi Jambi saat ini adalah sebesar 12%. Diharapkan setiap sektor dapat saling bekerja sama dan memastikan semuanya terpenuhi dalam rangka penurunan stunting. Kemudian, TPPS diharapkan dapat menjadi sumber data dalam rangka monitoring penurunan stunting, sehingga tercipta data yang valid dan akuntabel.





d. Hasil yang Dicapai

Kanwil DJPb Jambi dapat ikut serta berperan dalam program penurunan stunting pada Provinsi Jambi.

2. RAPAT KICK-OFF MEETING BIOCF-ISFL 2024

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 bertempat di Hotel Aston Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, para jajaran OPD.

c. Rincian Kegiatan

Pada Rapat Kick-Off Meeting BioCF-ISFL 2024 ini paparkan tiga fase pelaksanaan BioCF-ISFL, yakni:

- i) Perencanaan, telah dilaksanakan pada tahun 2019 s.d. 2020
- ii) Pra Investasi/*Pre Investment*, dilaksanakan pada tahun 2021 s.d. 2025
- iii) Penilaian Kinerja, dilaksanakan dua kali yakni tahun 2023 dan 2025.

Pada tahap *Pre Investment*, telah diluncurkan dana sebesar USD 13,5 Juta, dimana dana ini dibagi melalui dua cara, yakni melalui penerusan hibah sebesar USD 5.884 atau sebesar Rp. 82.386 Milyar dengan cara *On Granting* serta sisanya melalui Hibah Terencana. Adapun penerusan hibah diberikan kepada beberapa perangkat daerah, yaitu Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, Dinas TPHP, serta para KPH (KPH Merangin, KPH Bungo, KPH Sarolangun Hilir, KPH Tanjung Jabung Barat). Perangkat daerah yang hadir juga memaparkan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan BioCF-ISFL Tahun 2024.



d. Hasil yang Dicapai

Kanwil DJPb Jambi memperoleh informasi terkait dengan rencana kegiatan BioCF-ISFL untuk Tahun Anggaran 2024 serta meningkatkan koordinasi antara

Pemerintah Provinsi Jambi bersama dengan para OPD selaku penerima manfaat *Result-Based Payment (RBP)*.

3. **PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN DENGAN PEMKAB KERINCI**

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemkab Kerinci dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dan dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Kerinci.

b. Unit/Pihak Terlibat

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi - Bapak Burhani AS bersama Pj. Bupati Kerinci – Bapak Asraf didampingi oleh perangkat daerah dari masing – masing wilayah serta perwakilan dari Kanwil DJPb Provinsi Jambi (Bidang PPA II).

c. Rincian Kegiatan

Acara dibuka dengan sambutan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi yang menyampaikan maksud dan tujuan dari penandatanganan nota kesepakatan yaitu dalam rangka menjalin komunikasi dan sinergi yang kolaboratif dengan Pemda untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah. Selain itu, disampaikan juga reviu dari pelaksanaan anggaran dari Pemkab Kerinci. Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Pj. Bupati Kerinci yang menyampaikan harapan agar hubungan baik antara Pemkab Kerinci dengan Kanwil DJPb Provinsi Jambi terus terjaga dan semakin ditingkatkan. Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan HKPD dilakukan oleh Bapak Burhani AS sebagai perwakilan dari Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan Bapak Asraf sebagai perwakilan dari Pemkab Kerinci, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama.



d. Hasil yang Dicapai

Melalui kegiatan ini diharapkan dengan adanya kesepakatan pertukaran data dan informasi keuangan public serta kerja sama penguatan koordinasi penyelenggaraan

pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan public dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak serta berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan di daerah

4. SOSIALISASI PERENCANAAN, PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 7 Februari 2024 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.

b. Unit/Pihak Terlibat

KPPN Sungai Penuh memenuhi undangan sebagai narasumber dari Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh dengan Satuan Pendidikan di lingkup Kota Sungai Penuh sebagai peserta.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan ini dibuka dengan penyampaian tujuan kegiatan oleh Kepala Seksi Bank KPPN, dilanjutkan dengan pemaparan materi dan sesi diskusi. Materi yang disampaikan terkait Regulasi dan Penyaluran Dana BOSP TA 2024.



d. Hasil yang Dicapai

Satuan Pendidikan di lingkup Kota Sungai Penuh memahami regulasi mengenai Penyaluran Dana BOSP Tahun 2024. KPPN Sungai Penuh juga siap berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi oleh OPD dan Satuan Pendidikan terkait.

5. TALKSHOW TVRI “RUANG PUBLIK : THR 2024 CAIR”

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Maret 2024 bertempat di TVRI Jambi.



b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Kanwil DJPb Jambi, Kepala Bidang PPA I, serta pihak TVRI Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Talkshow Ruang Publik merupakan siaran langsung yang ditayangkan pada TV Nasional dan juga Youtube milik TVRI Jambi. Pada kesempatan tersebut, Kanwil DJPb Jambi menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyaluran THR 2024 serta realisasi belanja lingkup Provinsi Jambi.

Penerima THR tahun 2024 adalah Aparatur Negara (PNS, dan Calon PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara), Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. THR tidak diberikan kepada PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

THR yang bersumber dari APBN terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Sedangkan THR yang bersumber dari APBD terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Komponen tunjangan tambahan penghasilan ASN daerah memperhatikan kapasitas fiskal daerah masing-masing.

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam siaran pers APBN KiTA, alokasi THR secara nasional adalah sebesar 48,7 Triliun, dengan realisasi sampai dengan 24 Maret 2024 sebesar 13,4 Triliun untuk 625.112 pegawai pada 4.722 satker. Sementara itu, pada Provinsi Jambi, sampai dengan Senin, 26 Maret 2024 (cut-off data pukul 07.00), sudah dicairkan sekitar Rp 113,07 miliar untuk 22 ribuan personel pada 218 instansi (satker).

Secara keseluruhan, estimasi jumlah nominal yang akan dicairkan di Jambi sebesar Rp350 M. Jumlah penerimanya sekitar 64.155 personel, 12.162 personel pusat (Rp57 M) dan 55.366 personel daerah (Rp293 M). Komponen tunjangan tambahan penghasilan ASN daerah memperhatikan kapasitas fiskal daerah masing-masing. Beberapa daerah belum ada estimasinya karena menunggu peraturan kepala daerah.



d. Hasil yang Dicapai

Masyarakat memperoleh informasi terkait penyaluran THR 2024 lingkup Provinsi Jambi.

6. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RPJPD TAHUN 2025-2045 DAN PERUBAHAN RPJMD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2045 DAN PERUBAHAN RPJMD PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2024 bertempat di Abadi Convention Center.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan para Kepala Badan dan/atau Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga lingkup Provinsi Jambi

c. Rincian Kegiatan

Acara Musrenbang dilaksanakan untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

Forum ini membahas dan menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan, mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Perubahan dalam rencana tersebut bisa mencakup penyesuaian terhadap tantangan baru, seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial ekonomi.

Tujuannya adalah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Perubahan RPJMD biasanya dilakukan untuk menyesuaikan rencana pembangunan dengan kondisi terkini dan prioritas pembangunan yang mungkin berubah akibat dinamika internal maupun eksternal.



Dalam konteks Provinsi Jambi, perubahan RPJMD 2021-2026 mungkin diarahkan untuk menanggapi berbagai tantangan dan peluang baru, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi berbasis digital dan hijau, serta penanganan masalah lingkungan.

Proses perubahan ini melibatkan evaluasi kinerja dan pencapaian pembangunan daerah selama periode sebelumnya, konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, dan penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan diutamakan dalam sisa periode rencana.

Perubahan RPJMD ini ditujukan untuk memastikan bahwa pembangunan di Provinsi Jambi tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.



d. Hasil yang Dicapai

Menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memastikan bahwa pembangunan di Provinsi Jambi tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.



PELAKSANAAN KEGIATAN *LOCAL EXPERT*

Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara Triwulan I

KEGIATAN LOCAL EXPERT

1. RAPAT ALCO REGIONAL KOMITE UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

a. Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 pukul 14.00 s.d.16.00 WIB secara daring melalui *Teams Meeting*.

b. Unit/Pihak Terlibat

Rapat dihadiri oleh perwakilan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas, serta Perwakilan Pejabat Fungsional, Local Expert Provinsi Jambi dari Universitas Jambi serta pelaksana yang ada pada Kelompok Kerja RCE.

c. Rincian Kegiatan



Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Umum. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Desember 2023 serta topik yang akan dibahas dalam rapat. Topik yang dibahas antara lain Realisasi Penerimaan

Perpajakan dan issue strategis, Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai dan issue Strategis, Realisasi Penerimaan Lingkup DJKN dan Special Mission dan issue strategis, Realisasi Belanja APBN dan isu strategis, serta Perkembangan Ekonomi Regional, Realisasi TKD dan Isu Strategis.

d. Hasil yang Dicapai

Melalui rapat ini didapatkan kebijakan dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja antara lain (1) pembangunan ekonomi, (2) peningkatan SDM, (3) pembangunan infrastruktur, (4) pengelolaan SDA dan ketahanan bencana, dan (5) peningkatan tata kelola pemerintahan.

2. RAPAT ALCO REGIONAL KOMITE UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 2024

a. Waktu dan Tempat

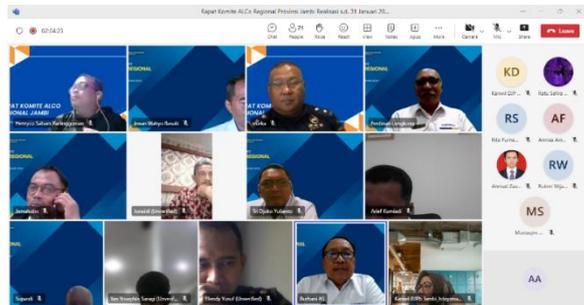
Rapat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 pukul 13.30 s.d.15.30 WIB secara daring melalui *Teams Meeting*.



b. Unit/Pihak Terlibat

Rapat dihadiri oleh perwakilan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas, serta Perwakilan Pejabat Fungsional, Local Expert Provinsi Jambi dari Universitas Jambi serta pelaksana yang ada pada Kelompok Kerja RCE.

c. Rincian Kegiatan



Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Umum. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Januari 2024 serta topik yang akan dibahas dalam rapat. Topik yang dibahas antara lain Realisasi Penerimaan Perpajakan

dan issue strategis, Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai dan issue Strategis, Realisasi Penerimaan Lingkup DJKN dan Special Mission dan issue strategis, Realisasi Belanja APBN dan isu strategis, serta Perkembangan Ekonomi Regional, Realisasi TKD dan Isu Strategis.

d. Hasil yang Dicapai

Melalui rapat ini didapatkan beberapa *fiscal tool* penyediaan infrastruktur konektivitas antara lain pendanaan publik melalui pengalokasian anggaran yang tepat dan penerbitan obligasi, insentif pajak dan subsidi, dan kemitraan public privat (PPP).

3. Rapat ALCo Regional Komite untuk Realisasi sampai dengan 29 Februari 2024

a. Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 pukul 14.00 s.d.16.00 WIB secara daring melalui *Teams Meeting*.

b. Unit/Pihak Terlibat

Rapat dihadiri oleh perwakilan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas, serta Perwakilan Pejabat Fungsional, Local Expert Provinsi Jambi dari Universitas Jambi serta pelaksana yang ada pada Kelompok Kerja RCE.

c. Rincian Kegiatan

Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Umum. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 29 Februari 2024 serta topik yang akan dibahas dalam rapat. Topik yang dibahas antara lain Realisasi Penerimaan Perpajakan dan issue strategis, Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai dan issue Strategis, Realisasi Penerimaan Lingkup DJKN dan Special Mission dan issue strategis,

Realisasi Belanja APBN dan isu strategis, serta Perkembangan Ekonomi Regional, Realisasi TKD dan Isu Strategis.



d. Hasil yang Dicapai

Melalui rapat ini didapatkan beberapa kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan antara lain: (a) Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Transportasi; (b) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Internet; (c) Penguatan Kapasitas Digital; (d) Kerjasama Publik-Privat; (e) Pengembangan Smart City; dan (f) Kebijakan Lingkungan dan Keberlanjutan.

4. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DISEMINASI FISKAL REGIONAL TENTANG CAPAIAN INDIKATOR DAN STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS DI PROVINSI JAMBI DALAM KERANGKA FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (FKPKN)

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Maret 2024 di Ruang Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Jambi bersama Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dinas PUPR Provinsi Jambi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Balai Pelaksana Jalan Nasional Jambi, KPPBC TMP B Jambi, dan Local Expert Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan didahului dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia raya, dan pembacaan doa. Kemudian, dilanjutkan dengan penyampaian sambutan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dan materi oleh para narasumber. Materi yang disampaikan antara lain Strategi Percepatan dan Peningkatan Daya Saing serta Kondisi Berbagai Indikator atas Infrastruktur Konektivitas di Provinsi Jambi oleh Kepala Satker P2JN Balai Pelaksana Jalan Nasional Jambi; Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas di Provinsi Jambi oleh Kabid Bina Program dan Tata Ruang Dinas PUPR



Provinsi Jambi; Capaian Indikator dan Strategi Peningkatan Daya Saing Konektivitas Infrastruktur Transportasi di Provinsi Jambi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi; Penyelenggaraan Smart City di Kota Jambi oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi; Pengembangan Potensi Kawasan Industri di Provinsi Jambi oleh Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi; dan Daya Saing dan Infrastruktur Konektivitas Provinsi Jambi oleh *Local Expert Junior* Kanwil DJPb Provinsi Jambi.



d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan didapatkan informasi terkait kondisi terkini pembangunan infrastruktur konektivitas di Provinsi Jambi dan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam membangun infrastruktur konektivitas di Provinsi Jambi. Selain itu, diperoleh kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan infrastruktur konektivitas yang dibutuhkan Provinsi Jambi terdiri dari pengembangan & pemeliharaan infrastruktur transportasi, peningkatan akses & kualitas layanan internet, penguatan kapasitas digital, kerjasama publik-privat, dan pengembangan Smart City.



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara Triwulan I



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

1. Dalam rangka meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN, APBD, dan TKD, telah dilaksanakan edukasi terhadap Satuan Kerja maupun OPD terkait secara berkelanjutan melalui pembinaan, sosialisasi, dan rapat koordinasi baik dari sisi perencanaan hingga pelaporan keuangan negara mengingat perubahan peraturan yang sangat dinamis.
2. Demi mendukung pemberdayaan serta penguatan peran UMKM terhadap perekonomian Provinsi Jambi, telah dilaksanakan FGD Pemberdayaan UMKM dan FGD Monitoring dan Pemberdayaan UMKM KPPN Bangko
3. Sebagai upaya untuk mengetahui faktor penyebab tingkat pengangguran dan strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi pengangguran, peningkatan investasi daerah serta perbaikan kondisi iklim dunia usaha di Provinsi Jambi, Kanwil DJPb Provinsi Jambi menyelenggarakan FGD Diseminasi dan FKPKN Fiskal Regional terkait Kondisi dan Strategi dalam Pengurangan Pengangguran
4. ALCo atau *Asset and Liabilities Committee* Regional merupakan struktur di tingkat provinsi yang memiliki hubungan kerja serta memiliki peran untuk mendukung ALCo di tingkat Pusat melalui penyajian data dan informasi yang bersifat regional seperti informasi terkait APBN, APBD, Perpajakan, Bea Cukai dan Kekayaan Negara lingkup wilayah Provinsi Jambi yang menggambarkan kondisi perekonomian di Provinsi Jambi.
5. Sebagai upaya mewujudkan penguatan dan kerja sama dengan pihak eksternal seperti akademisi, pimpinan daerah, dan profesional di bidang ekonomi dan keuangan negara di wilayah Provinsi Jambi, Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah mensinergikan FKPKN dengan TPID, TP2DD, TPPS, dan berpartisipasi dalam keterlibatan berbagai forum di daerah serta melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Daerah.



REKOMENDASI

1. Melaksanakan monitoring dan pendampingan penyusunan laporan keuangan secara rutin triwulanan. Monitoring berupa hal-hal yang harus dilakukan oleh satker untuk akuntansi dan pelaporan keuangan dan kendala-kendala yang dihadapi agar segera dapat diberikan saran dan masukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara daring agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dapat mengikuti kegiatan dengan fleksibel dan tidak terbatas pada satuan kerja vertikal tetapi pada Pemerintah Daerah termasuk Badan Layanan Umum Daerah.
2. Meningkatkan komunikasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan ALCo Regional baik Kemenkeu Satu, Pemerintah Daerah, *local expert* dan instansi lainnya. Hal ini bertujuan agar informasi dapat tersampaikan secara cepat dan tepat sehingga ALCo Regional yang disusun menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi.
3. Dalam rangka peningkatan kualitas BLUD, hal yang paling dibutuhkan adalah pembangunan komitmen oleh pimpinan serta pihak Kanwil DJPb Provinsi Jambi dapat menyelenggarakan kegiatan FGD bersama dengan pimpinan BLUD berkaitan dengan sustainabilitas pengelolaan BLUD.
4. Intervensi pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang kemudian diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi, seperti melalui program-program untuk penyesuaian kurikulum SMK dan pelaksanaan pelatihan. Selain itu, investasi yang masuk, baik dari dalam maupun luar negeri merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran serta menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi.
5. Membangun dan meningkatkan komunikasi dua arah dengan Pemerintah Daerah. Bagi Kanwil DJPb Provinsi Jambi, hal ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD termasuk dana TKD. Bagi Pemerintah Daerah, hal ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Selain itu, baik Kanwil DJPb dan Pemerintah dapat lebih aktif dalam melakukan pertukaran data untuk kepentingan analisis yang berguna bagi peningkatan pengelolaan keuangan negara.
6. Membangun komunikasi dengan satker pusat yang berada di wilayah Jambi. Hal ini bertujuan agar Kanwil DJPb Provinsi Jambi mengetahui kendala yang dihadapi satker dalam penyaluran APBN, pengelolaan keuangan dan optimalisasi nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) satker. Bagi satker, hal ini perlu karena bisa mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan terkait penyaluran APBN, pengelolaan keuangan dan mengoptimalkan nilai IKPA.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi

